Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Konsorsium PERMAMPU

Edisi Khusus



Evaluasi Eksternal PERMAMPU



Champions Keluarga HKSR Tingkat Provinsi Jambi



Seminar Virtual Pertanggungjawaban Publik Konsorsium PERMAMPU

MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

WEBINAR

Pertanggung Jawaban Publik Konsorsium PERMAMPU

"SUARA PEREMPUAN AKAR RUMPUT & PENDUKUNG UNTUK KOMITMEN DAN KEBERLANJUTAN ADVOKASI HKSR PEREMPUAN DI SUMATERA"

TOPIC:

1. ADVOKASI HKSR & INOVASI PERMAMPU
2. SUARA AKAR RUMPUT & PENDUKUNG

31 Agustus 2020



PEMBICARA KUNCI

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI / Deputi Bidang Kesetaraan Gender

MODERATOR



Sonya Helen Sinombor
Jurnalis Seni

PENANGGAP



H. Bundra Jaya SH, MH
Bupati Kab. Seluma



DR. Eddy Keleng Ate Berutu
Bupati Kab. Dairi



H. Rohidin Mersyah, M.M.A
Gubernur Bengkulu

Perwakilan PERMAMPU



Kate Shanahan
Team Leader MAMPU



Dina Lumbantobing
Koordinator PERMAMPU



Lucy Herlina
Pengawas PERMAMPU



Elpina Sipayung
Grant Manager PERMAMPU

Kementerian PPN/ Bappenas

MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Konsorsium PERMAMPU

Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Pimpinan Redaksi	Dina Lumbantobing	Kontributor	Direktur Eksekutif
Sekretaris Redaksi	King Ronald Silalahi		Koord Program
Editor Tulisan	Dina Lumbantobing		Staf Lapang Lembaga Anggota

SEKRETARIAT PERMAMPU
Jl. Pancur Siwah No. 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com Telp/Fax. 061-8361102
Facebook : PermampuConsortium, www.permampu.org

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Inilah slogan PERMAMPU yang kita bangun sejak melaksanakan program Advokasi HKSR Perempuan. Slogan ini menunjukkan kemandirian perempuan terhadap pikiran, semangat dan tubuhnya; tetap sehat dan terus berkreasi.

PERMAMPU yang berdiri di tanggal 27 November 2012, mengirim Letter of Interest/LOI yaitu pernyataan berminat menjadi mitra MAMPU di tahun 2013; dan disambut oleh MAMPU. MAMPU adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang bekerja sama dengan 13 mitra di Indonesia, salah satu di antaranya adalah PERMAMPU. Dari 5 tema yang menjadi program MAMPU, PERMAMPU bekerja untuk tema 4 yaitu memperkuat kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik.

Di tahun 2014, PERMAMPU kemudian melaksanakan penelitian kualitatif feminis mengenai Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) di tahun 2014. Hasil penelitian ini menjadi dasar penyusunan program kita, dengan 4 tujuan akhir (EOPO) yaitu:

EOPO 1 : Perempuan akar rumput(pedesaan, miskin kota, muda (12-20 tahun) mempunyai kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi untuk pemenuhan HKSR).

EOPO 2 : Perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam layanan HKSR yang mudah, cepat, tepat dan bermutu

EOPO 3 : Institusi keluarga, adat dan agama melakukan perubahan aturan adat dan tafsir agama terkait HKSR (FMS).

EOPO 4 : Pemerintah desa dan kabupaten/kota membuat kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan HKSR .

Tepat 31 Agustus 2020, Program Advokasi HKSR PERMAMPU selesai secara dukungan dari MAMPU. Setelah hampir 7 tahun bermitra dengan MAMPU, maka tibalah saatnya melihat kembali apa saja yang sudah kita capai dan proses yang kita tempuh. Semua akan kami tuangkan dalam Newsletter kita kali ini, yang kita sebut sebagai EDISI KHUSUS.

Dalam Newsletter edisi khusus ini, kami akan menyampaikan hasil akhir program ini per 31 Agustus 2020, dan hasil Evaluasi Eksternal yang baru selesai di akhir September 2020; serta rencana keberlanjutan Konsorsium PERMAMPU.

Salam solidaritas.
Dina Lumbantobing.
Koordinator Pelaksana Permampu.

DAFTAR ISI

1. Editorial
2. Salam Redaksi
3. Akuntabilitas
4. Evaluasi Eksternal PERMAMPU
5. Keberlanjutan
6. Seminar Virtual
7. Cerita Sukses dan Pembelajaran PERMAMPU

Kementerian PPN/ Bappenas
Australian Government
MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Konsorsium PERMAMPU

CAPAIAN PROGRAM PER AGUSTUS 2020

Dalam periode ini, Konsorsium Permampu telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Semester 1 tahun 2020. Di beberapa indicator capaian untuk semester ini menurun akibat pembatasan pertemuan langsung (off line) di masa wabah Covid-19, sebagai berikut :

Indikator	Jumlah	Jumlah Anggota	
		Perempuan	Laki-Laki
1. Jumlah Kelompok Ekonomi. 1. Jumlah Kelompok 2. Jumlah Saham 3. Jumlah Pinjaman Beredar 4. Sisa Hasil Usaha 2019	 589 kelompok Rp 64,689,985,976 Rp 62,291,018,882 Rp 9.666.249.189,-. 35 kab./kota	23.610	
2. Jumlah perempuan muda yang aktif dan dilatih.	30 kabupaten/kota	20.933	
3. Jumlah perempuan disabilitas yang dijangkau.	26 kabupaten/kota	185	5
4. Jumlah lansia yang dijangkau.	26 kabupaten/kota	3.109	
5. Jumlah perempuan korban KTP yang ditangani langsung.	26 kabupaten/kota	2.097	
6. Jumlah perempuan yang difasilitasi mengakses layanan kesehatan.	18 kabupaten/kota	37.699	
7. Perempuan potensial di PEMILU 2019	Terpilih 3 dampingan di 3 Kab., 9 dukungan di 2 Kab. & 4 Propinsi[1]	57	
8. Total **FKPAR**	35 kabupaten/kota	25.234	
9. Jumlah pembatra yang terlibat dalam program.	4 kabupaten/kota	102	
10. Champions **Keluarga Peduli HKSR**	33 Kabupaten	284	284
11. Jumlah **OSS & L** [2]	31 OSS&L di 27 Kabupaten/5 Propinsi		

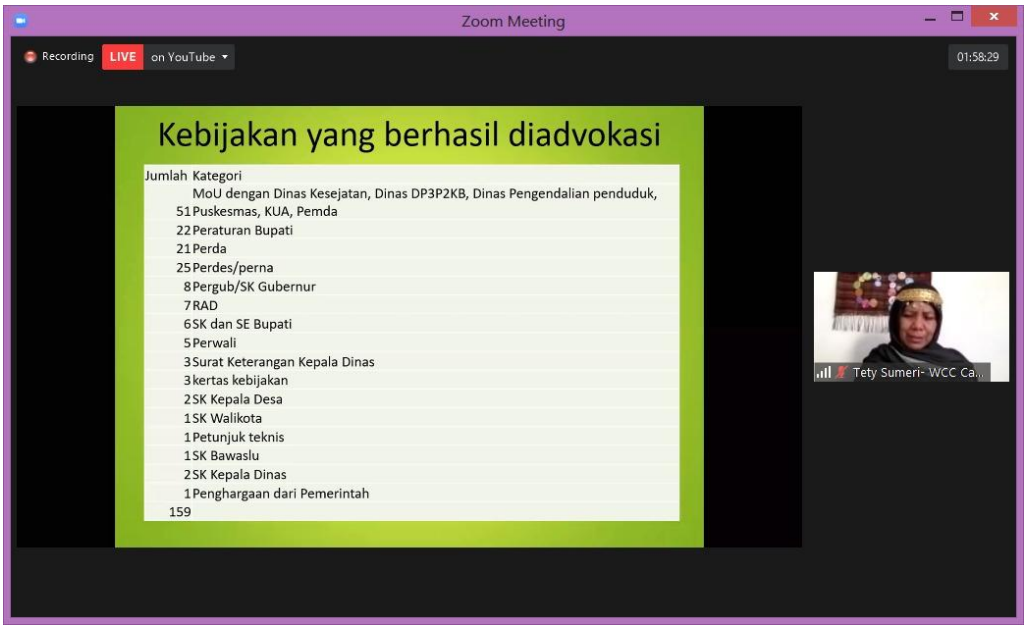
[1] 3 Perempuan sebagai DPRD di Kab. Pakpak Bharat 1 orang, 1 orang di Kab. Humbang Hasundutan,dan 1 orang di Jambi. Sementara dari 9 perempuan potensial yang didukung Permampu, terpilih 2 orang sebagai DPD dari Sumatera Utara dan Jambi, 1 DPRD Provinsi SUMSEL, 1 DPRD Provinsi Sumatera Utara, 1 Kabupaten Humbang Hasundutan, 1 dari kabupaten Pakpak Bharat.

[2] Yang berjalan secara regular sampai saat ini: 19 OSS&L di 17 Kabupaten 5 Propinsi (3 di Aceh, 4 di SUMUT, 1 di SUMBAR, 3 Bengkulu dan 8 Lampung.

Indikator	Jumlah	Jumlah Anggota	
		Perempuan	Laki-Laki
12. Jumlah Tokoh Agama yang difasilitasi	1.775 orang di 26 kabupaten/kota	550	1.225
13. Jumlah Tokoh Adat	716 orang di 26 kabupaten/kota	358	358
14. Anggota dan Pengurus FMS yang aktif.	381 orang di 26 kabupaten/kota	251	130
15. Jumlah Femokrat	4 kabupaten/kota	239	
16. Jumlah aparatur Pemerintah terlibat dalam program tingkat desa hingga kabupaten/kota.	5.222 26 kabupaten/kota	3.243	1.979

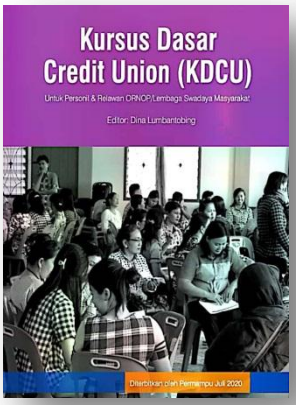
Selama masa program MAMPU, ada 159 kebijakan yang berhasil diadvokasi/ diperoleh Anggota PERMAMPU dengan rincian sebagai berikut:

- 51 berupa MoU dengan Dinas Kesehatan, Dinas DP3P2KB, Dinas Pengendalian penduduk, Puskesmas, KUA, Pemda; a.l. tentang: Mou PPSW Sumatera dan UPT Puskesmas Bantaian, Bagan Siapi Api tentang PeningkataProgram HKSR sesuai SPM Kesehatan dan TPB; MoU Pesada dengan Kantor Kemanag Kab. Nias Barat tentang Advokasi Pemenuhan HKSR melalui Pencegahan Perkawinan Anak di Kab. Nias Barat,
- 22 Peraturan Bupati, mis: Peraturan Bupati Kab. Seluma No 27 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; Peraturan Bupati Kab Padang Pariaman No 29 Tahun 2019 tentang Pemberiaan ASI Ekslusif
- 21 Perda, mis: Qanun Kabupaten Aceh Utara No 1 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak; Perda Kab. Tanah Datar No 6 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.
- 25 Perdes/Perna mis: Perdes Jati Sari No 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Di Wilayah Desa Jati Sari, Peraturan Nagari Koto No 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 8 Pergub/SK Gub, mis: Peraturan Gubernur Bengkulu N0 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak; SK Gubernur Lampung tentang Pebentukan Tim Koordinasi Daserah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019
- 7 RAD mis: RAD Pencegahan Perkawinan Pada Anak Kab. Seluma
- 6 SK dan SE Bupati, mis: SE Bupati Merangin tentang Penyusunan Anggaran Yang Responsi Gender; SK Bupati Lampung Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah TPB
- 5 Perwali, 3 Surat Keterangan Kadis, mis: Perwako Kota Padang No 55 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Atas Anak; SK Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan tentang Penetapan Puskesmas Branti Raya Sebagai Puskesmas Yang Memberikan Pelayanan HKSR.
- 3 Kertas Kebijakan,
- 2 SK Kepdes
- Penghargaan dari Pemerintah

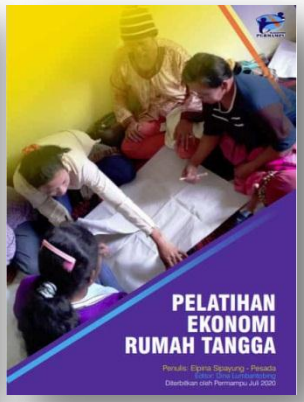


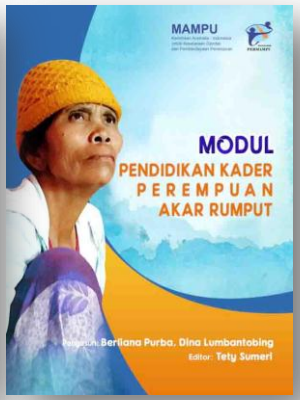
Sementara produk pengetahuan yang telah dihasilkan selama impelementasi program yaitu:

- Newsletter Permampu, edisi 1-11 (terbit tiap 6 bulan)
- Buku Kepemimpinan Perempuan di ORNOP/LSM Perempuan di Sumatera.
- Tiga buku elektronik (Penguatan ekonomi,OSS&L, Perempuan Potensial, Pengalaman Advokasi Masyarakat Adat Nias).
- Lima modul yang disusun tim PERMAMPU (Kursus Dasar CU, Ekonomi Rumah Tangga, Pendidikan Kritis Covid, Kader, Komunikasi Asertif)
- Ada 2 buku : Pegangan pelaksanaan RAT CU/Koperasi.
- Booklet, flipchart dan video sebagai bahan pendidikan kritis dan penyadaran bagi perempuan akar rumput dan para pihak yang mendukung program ini.















EVALUASI EKSTERNAL PERMAMPU



Evaluasi Eksternal PERMAMPU

Sejak tanggal 10 Agustus hingga 29 Agustus 2020, dua orang Evaluator Eksternal yaitu: Budi Wahyuni dan Anna Marsiana telah melakukan evaluasi eksternal. Di bawah ini disampaikan rekomendasi dan kesimpulan yang disampaikan di akhir September 2020 sbb:



Kesimpulan

- **Relevansi**
  Seperti diuraikan di atas, pilihan isu dan program sangat relevan, baik dilihat dari konteks persoalan perempuan di Indonesia, kesesuaian konsern semua anggota konsorsium, maupun konteks sosial dan budaya di mana dalam banyak hal adat dan agama justru menjadi belenggu yang lebih kuat dari pada program pemerintah dan kebijakan negara.
  Jika melihat konteks sosial-politik Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa isu maupun pendekatan masih tetap relevan untuk lima (5) tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan.

- **Efektifitas**
  Pilihan strategi, target group, maupun pendekatan dan intervensi program yang dijabarkan ke dalam empat (4) EOPO telah terbukti efektif dalam memastikan pencapaian target capaian.
  Pilihan tiga (3) area intervensi: perempuan akar rumput (termasuk perempuan muda) melalui upaya perbaikan di 3 aspek, yaitu penguatan ekonomi, peningkatan pengetahuan, kesadaran HKSR, serta penguatan gerakan kolektif (EOPO 1 & EOPO2), intervensi di area social-budaya dan agama, melalui upaya transformasi nilai dan keyakinan serta praktek budaya dan agama, ada akhirnya transformasi aturan dan praktek adat dan agama (EOPO 3), dan intervensi kepada pemerintah dan jajaran terkait (pemdes, puskesmas, Pemkot, DPRD dst) untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses atas pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HKSR melalui: penyediaan dan peningkatan layanan HKSR (OSS&L) di puskesmas, pengintegrasian HKSR ke dalam program pembangunan (Desa, Kota/Kab), maupun penerbitan kebijakan/ peraturan yang pro-HKSR (EOPO 2 dan 4), seperti diuraikan dalam temuan dan analisis tentang efektifitas di atas telah menunjukkan efektifitasnya dalam memastikan bahwa perempuan mendapatkan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan akan HKSR.

Bahwa evaluasi menemukan capaian empat EOPO tidak merata di delapan lembaga, sangatlah bisa dimengerti, mengingat delapan lembaga memiliki titik berangkat yang berbeda dalam isu HKSR. Di samping itu, meskipun capaian EOPO tidak merata, namun terlihat ada peningkatan efektifitas dari lembaga, sehingga menambah poin efektifitas program secara keseluruhan. Oleh karena itu capaian yang tidak merata di delapan lembaga anggota itu tidak bisa dibaca sebagai kegagalan.

- **Efisiensi**
  Dikarenakan keterbatasan waktu maupun kertebatasan metodologi yang dimungkinkan karena konteks pandemic COVID-19 yang masih berlangsung, evaluator tidak melakukan penggalian informasi secara mendalam terkait budget, sehingga aspek efisiensi tidak disajikan secara detil bagaimana setiap rupiah berkontribusi secara efisien dalam pencapaian outcome dan dampak. Aspek efisiensi dilihat lebih secara umum, dari aspek besaran dana secara total, capaian yang muncul dan sebaran wilayahnya, maupun peningkatan efektifitas dan performance lembaga yang dihasilkan dalam lima (5) tahun ini. Dilihat dari besaran total budget selama lima (5) tahun yaitu sebesar IDR 37.115.830.608 untuk 8 organisasi.Itu artinya rata-rata anggota beroperasi dengan total budget IDR 4.639.479.000 untuk lima tahun atau setara dengan kurang lebih IDR 927.900.000 /tahun, yang mana jika dibandingkan dengan cakupan capaian atau pun wilayah, dan fektifitas program maupun lembaga seperti dipaprkan di atas, maka program ini bisa dikatakan sangat efisien. Sedangkan dari laporan audit tahunan yang dikirim kepada evaluator bisa dikatakan bahwa PERMAMPU telah melaksanakan azas akuntabilitas dan transparansi dengan baik.

- **Dampak**
  Dengan tercapainya indikator-indikator yang sudah ditetapkan dalam keempat EOPO, seperti diuraikan di bawah topik "efektifitas"di atas maka bisa dikatakan bahwa program yang dijalankan selama lima (5) tahun ini sudah berkontribusi bagi munculnya dampak dalam arti yang lebih luas.

Meningkatnya kapasitas ekonomi, pengetahuan terkait HSKR maupun kapasitas dan keterlibatan dalam gerakan kolektif akan menghasilkan dampak yang lebih luas bagi perempuan lain. Dengan kepercayaan diri dan ketrampilan baru maupun jaringan yang dimilikinya, para perempuan ini bisa menjangkau perempuan lain di desa/komunitas/ kelurahan mereka maupun dalam organisasi di luar PERMAMPU di mana mereka terlibat.

Dengan tercapainya OSS&L di 19 puskesmas di 17 kabupaten di 5 propinsi (Flower Aceh dengan 3 OSS&L, PESADA berhasil dengan 4 OSS&L yang berjalan regular yaitu: Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan dan Nias Barat, LP2M juga memiliki 1 OSS&L yang berjalan regular, Bengkulu 3 OSS&L serta Lampung dengan 8 OSS&L), maka selain OSS&L ini bisa meningkatkan kualitas layanan HKSR bagi perempuan sehingga perempuan mendapatkan hak pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HKSRnya, maka sembilan belas OSS&L ini bisa menjadi tempat rujukan bagi puskesmas-puskesmas lain. Begitupun capaian-capaian semacam Perdes, Perbup, Pergub dan RAD-PTB, bisa menjadi rujukan bagi daerah lain untuk mereplikasinya yang pada gilirannya memperluas dampak.

Apalagi benih-benih perluasan perubahan di luar target group alias dampak seperti di atas dari sharing yang dibagikan baik oleh perempuan maupun stakeholders lain nampak sudah muncul perluasan dampak dalam arti bukan hanya di lingkaran target group, melainkan di luar lingkaran, namun merupakan ranah pengaruh para pemangku kepentingan tsb. Misalnya, tetangga para perempuan akar rumput, anggota organisasi di mana para FEMOKRAT berada dan aktif, atau orangtua dari anggota FPM yang kebetulan bukan anggota FKPAR atau tidak bisa ikut akitf terlibat dalam aktifitas-aktifitas FKPAR. Hal lain yang layak disebut juga adalah yang terjadi di Bengkulu, di mana capaian di Kabupaten Seluma, yang kemudian diperluas sampai di level propinsi. Demikian pula FMS terbukti efektif sebagai forum dan sarana.

- **Keberlanjutan**
  Benih-benih keberlanjutan sudah terlihat baik di level akar rumput, pemangku kepentingan maupun juga anggota PERMAMPU. Tiga pilar utama dari program ini: (1) perempuan akar rumput dan perempuan muda, (2) tokoh dan institusi budaya dan agama, serta, (3) tokoh dan institusi pemerintah, telah menunjukkan perubahan pada tingkatan kesadaran-perilaku dan kebijakan yang akan berkontribusi pada keberlanjutan aktifitas maupun dampak.
  Meskipun demikian pada saat yang sama juga masih banyak hal kecil yang masih perlu dituntaskan seperti terlihat dalam tantangan efektiftas dan dampak di atas. Di sana-sini masih ada perspektif yang belum tuntas, maupun pendapingan lanjutan yang masih sangat perlu dilakukan. Terkait keberlanjutan, maka menurut evaluator, komitmen donor untuk menuntaskan pekerjaan rumah kecil-kecil namun sangat significant di atas masih diperlukan.



Evaluator Eksternal Permampu :
Anna Marsiana dan Budi Wahyuni

Rekomendasi

Terkait Penguatan Ekonomi

- Proses pengorganisasian
  Proses pengorganisasian harusnya dipastikan selalu dikembalikan kepada prinsip pengorganisasian dan penguatan masyarakat (*community organizing and community empowering*) di mana fondasi kekuatan utama ada pada akar rumput, dalam artian yang sebenarnya.
- Pendampingan ekonomi akan lebih optimal jika dalam konsep maupun implementasinya bersifat sistematis dan memikirkan aspek keberlanjutannya misalnya mengoptimalkan potensi jaringan pertumbuhan usaha maupun marketing.
- Ekonomi perempuan muda merupakan kelompok strategis, yang harus mendapat perhatian lebih & pendampingan sistematis: misal posisi dalam CU, potensi pengembangan bisnis, pembangunan kader Gerakan kolektif.

Terkait Perspektif HKSR:

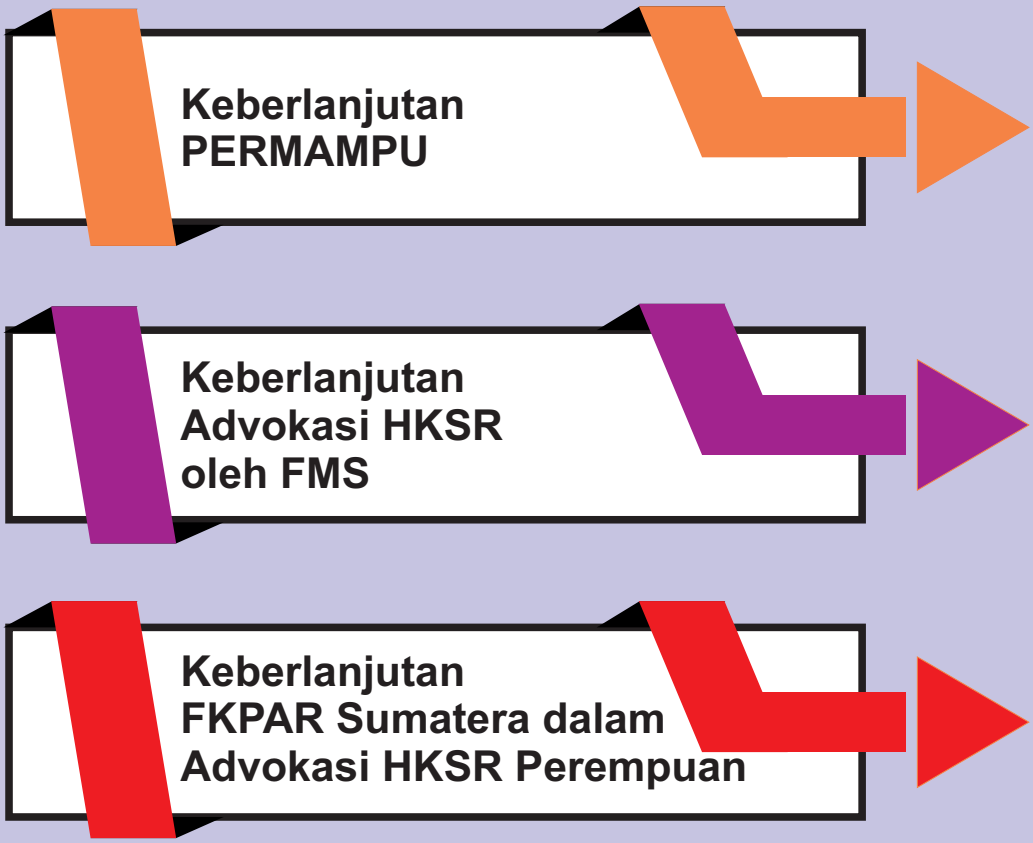
- Memastikan bahwa ruang lingkup HKSR sesuai dengan konsep, yang mencakup seluruh aspek HKSR : fisik, psikis, sosial-spiritual
- ICPD 1994, CEDAW, dan WHO sebagai acuan bersama tentang HKSR .
- Pendekatan HKSR tidak bisa dilepaskan dari konstruksi gender yang timpang dan harus dipastikan tidak bias gender
- Masih perlu perhatian khusus penguatan aspek gender & HKSR di antara tokoh adat dan agama, mengingat nilai strategis mereka.

Terkait Strategi :

- FMS perlu dipertahankan terlepas dari program PERMAMPU akan lanjut atau tidak
- Memastikan keberlanjutan OSS&L
- Pentingnya mendokumentasikan praktek-praktek baik terkait perubahan adat dan agama.
- Pentingnya membangun indikator yang bersifat kuantifitatif & kualitatif mencakup semua aspek fisik, psikis, sosial-spiritual
- Pentingnya melanjutkan program HKSR ini minimal untuk 3-5 tahun ke depan.

Terkait konsorsium secara umum: **perlu dipikirkan upaya sistematis mengurangi kesenjangan kapasitas di antara anggota konsorsium.**

KEBERLANJUTAN



KEBERLANJUTAN PERMAMPU

Meski dukungan MAMPU telah berakhir di 31 Agustus 2020, Advokasi HKSR sedapat mungkin akan terus dilanjutkan meski dengan keterbatas. Untuk itu di bawah ini disampaikan Rencana Keberlanjutan Permampu dalam Advokasi HKSR sbb.:



- **EOPO 1 :**
  - Meneruskan kelompok ekonomi dan pengembangan kewirausahaan perempuan muda/FPM.
  - Pendidikan kader dan optimalisasi kader perempuan, perempuan muda dan laki-laki.
  - Advokasi melalui aksi kolektif (FKPAR, FMS, Femokrat), siaran pers, kampanye, 'urgent action' dan Rapat Tahunan Permampu bersama Perempuan Akar Rumput.
- **EOPO 2 :**
  - Mengupayakan keberlanjutan OSS & L dan menerbitkan buku pegangan ringkas penyelenggaraan OSS&L
  - Menerbitkan e-book Pendidikan Kesehatan Tubuh dan Reproduksi untuk Anak.
- Mencari dana program melalui penulisan proposal ke lembaga dana maupun ke Pemerintah RI, misalnya melalui program Swakelola tipe 3[1], yang sesuai dengan strategi PERMAMPU.
- Melanjutkan upaya mengembangkan Women Fund melalui iuran anggota (dana keberlanjutan), konsultansi (jasa melaksanakan PrimeL ke luar PERMAMPU, training) dan penjualan produk (buku, modul).

Mulai mengimplementasikan rencana mengenai Women's Welfare & Care (WWC) melalui ide kreatif sesuai kondisi (wabah/bencana, akses ke komunikasi virtual) dan layanan perempuan dalam kondisi khusus dan membangun kerelawanan.

KEBERLANJUTAN ADVOKASI HKSR OLEH FMS



FMS Aceh

a. Memperkuat sinergi dunia usaha, NGO dan Pemerintah.
b. Advokasi dan pengawalan anggaran untuk pemenuhan HKSR perempuan.
c. Melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam kolaborasi ini

FMS Sumatera Utara

a. Melakukan koordinasi dengan tokoh adat, agama dan lembaga budaya desa.
b. Memaksimalkan kerja tim FMS, membangun struktur kerja dan rencana kerja FMS dan rencana anggaran serta evaluasi dari implementasi rencana kerja.
c. Mencari dukungan dana dari luar pemerintah.
d. Membangun kontrak politik dengan calon dalam Pilkada Kab. Pakpak Bharat dan Nias

FMS Riau

a. Mendorong kebijakan yang responsive gender.
b. Meningkatkan kegiatan yang positif untuk membuat kegiatan yang positif dari perempuan muda yang muda

[1] PESADA dan Flower Aceh direncanakan menjadi piloting (Knowledge Sector Initiative /KSI bekerja sama dengan Program DFAT lainnya, AIPJ2, INOVASI, KIAT, MAMPU dan PEDULI memperkenalkan dan berbagi pengalaman menggunakan Swakelola Tipe III.

c. Meningkatkan sinergi antar instansi untuk persoalan-persoalan HKSR dari dinkes, institusi pendidikan dan masyarat, tokoh adat dan tokoh agama.
d. Mengembangkan kegiatan produktif untuk meningkatkan kegiatan berusaha, dengan menggunakan bahan-bahan local

FMS Sumatera Barat

Kesepakatan melakukan pendidikan calon pengantin melibatkan tokoh adat dan agama.

a. Mengintegrasikan issu HKSR dalam Program OPD dan Pemerintah Desa.
b. Mengaktifkan FMS dalam strategi advokasi.
c. Meningkatkan partisipasi tokoh masyaratkat dalam musrembang.
d. Pembinaan kader di Posyandu dan PAUD agar bisa memberikan pemahaman kepada orang tua.
e. Kader menjadi motivator tingkat kelurahan.
f. Advokasi anggaran Dinas P3KB untuk pemenuhan HKSR antara lain pengembangan sekolah perempuan keluarga peduli HKSR.

FMS Jambi

a. Memaksimalkan kader-kader yang sudah dididik APM.
b. Kaderisasi melalui penguatan kepemimpinan melalui FPM
c. Advokasi jaringan melibatkan forum-forum yang ada dan jaringan yang ada.

FMS Bengkulu

a. Penguatan regulasi terkait pemenuhan HKSR melalui DAK, BOK Dinkes.
b. Memperkuat issu-issu HKSR.
c. Ikut mengawal anggaran dan hearing di Banggar.

FMS Sumatera Selatan

a. Bersinergi dengan forum yang ada, misalnya PUSPA, Gender, Kualitas Hidup Perempuan yang ada di dinas-dinas terkait.
b. Menggalakkan forum-forum virtual, lebih efisien.
c. Anggota FMS akan mensinergikan dengan OPD.

FMS Lampung

a. Melakukan lobby di acara-acara politik.
b. Mendorong kegiatan-kegiatan kesetaraan gender untuk masuk dalam ADD.
c. Menggalakkan desa layak anak, kabupaten layak anak, dengan memasukkan indikator : tidak ada perkawinan di bawah 19 tahun.
d. Pengintegrasian ke Kemenag, atau sosial keagamaan untuk FKUB untuk capaian EOPO 3.

KEBERLANJUTAN FKPAR SUMATERA DALAM ADVOKASI HKSR PEREMPUAN

FKPAR Aceh

a. Pertemuan konsolidasi regular FPM
b. Kampanye melalui media sosial, website, dan lain-lain.

FKPAR Sumatera Utara

a. Pengembangan CU sebagai penguatan ekonomi dan gerakan perempuan akar rumput melalui alokasi dana/SHU
b. Wirausaha yang telah dimulai, dapat dilanjutkan utk pembiayaan kegiatan FPM dan juga utk usaha perempuan muda itu sendiri.
c. Menindaklanjuti kontrak politik dengan perempuan anggota DPRD & DPD dukungan FKPAR
d. Menjalin MoU dengan Partai Politik dalam hal memberikan peningkatan kapasitas kepada perempuan potensial yang akan masuk menjadi calon (Bupati, DPRD, Walikota,dll)
e. Menghubungkan ke pemerintah semacam kursus-kursus keterampilan yang bisa menjadi life skill bagi perempuan
f. Membangun sinergi dengan lembaga2 adat & agama untuk pemenuhan HKSR.

FKPAR Riau

Membangun media dan system komunikasi FKPAR dan FPM dari kabupaten hingga propinsi.

FKPAR Sumatera Barat

a. Melakukan kerja sama dengan PKK untuk program HKSR dan Gizi

b. Meningkatkan kapasitas perempuan untuk mampu mendorong Anggaran dana nagari atau dana kelurahan untuk HKSR-Gizi
c. Melakukan kerja sama dengan anggota legislatif untuk pengembangan usaha PUK anggota APUK
d. Menggunakan forum para pihak yang sudah ada di nagari hingga kab./kota untuk mempromosikan isu HKSR-Gizi
e. Membuat MoU antara Tim Layanan dengan Puskesmas untuk pengembangan program HKSR-Gizi bagi perempuan dan perempuan muda yang berkelanjutan
f. Mendorong Puskesmas Enam Lingkung untuk mengeluarkan SK Tim OSS&L
g. FKPAR tingkat provinsi dan JarPUK di tingkat Kab/Kota untuk terus mempromosikan pentingnya upaya pemenuhan dan perlindungan HKSR

FKPAR Jambi

a. Ada pertemuan secara berkala, minimal 1 x 3 bulan.
b. Swadaya dan iuran anggota ditingkatkan.
c. Memperkuat Ekonomi perempuan baik secara individu kelompok maupun melalui Kopwan.
d. Advokasi APBD, ADD, dan CSR Perusahaan.
e. Menyediakan jasa fasilitator maupun sebagai narasumber yang berasal dari kader-kader terlatih untuk program pemberdayaan masyarakat dan issu perempuan, baik di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten, bahkan provinsi.
f. Berjejaring dan membangun hubungan baik dengan sesama NGO, organisasi perempuan, pemda, pemdes, dan mitra lainnya.
g. Melanjutkan kerjasama yang telah terbangun dengan pihak - pihak terkait. Diantaranya: PIKR dengan pihak Sekolah, PKPR dengan Puskesmas,Genre dengan BKKBN, Posyandu remaja, Stunting, Pendampingan kasus dengan PUSPA,dan P2TP2A dan Pembekalan kespro bagi caten (bersama KUA)

FKPAR Bengkulu

a. Membuat jadwal dan intens melakukan komunikasi dan koordinasi kepada semua pihak baik FKPAR, FPM, dan FMS untuk tetap memperjuangkan pemenuhan HKSR serta pencegahan kawin anak.
b. Dengan adanya UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 maka kita bisa mensosialisasikan cegah nikah anak, karna umur minimal nikah adalah 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki, termasuk mempromosikan layanan OSSL di puskesmas percontohan kita agar akses layanan kesehatan bisa dengan mudah tepat dan bermutu di dapat oleh perempuan.
c. Membiasakan menggunakan media online / virtual meeting sebagai salah satu strategi untuk berdiskusi.

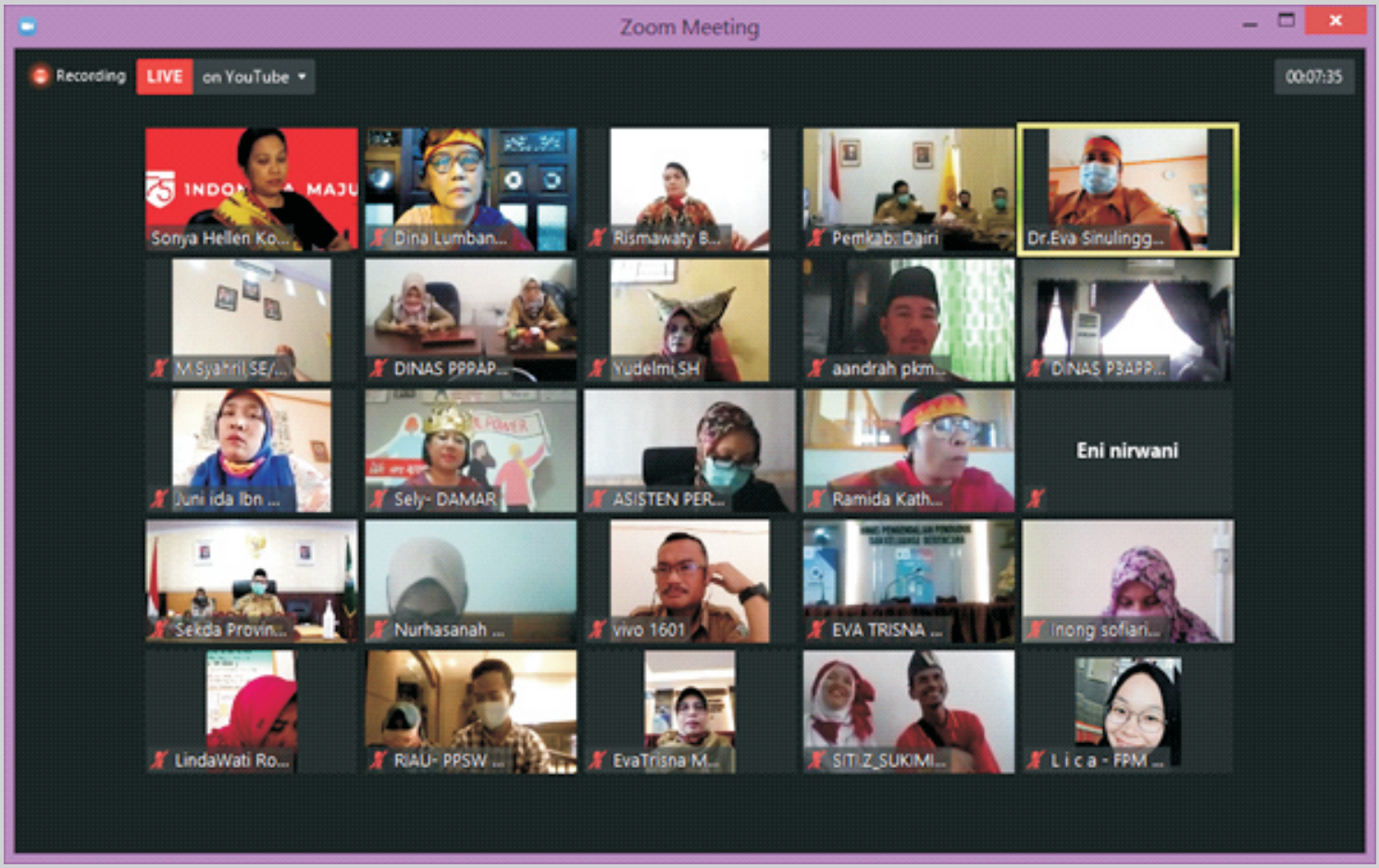
FKPAR Sumatera Selatan

a. Menambah anggota CU
b. Melakukan audiensi ke DPRD propinsi agar diberi peluang dan pemenuhan hksr.
c. Audiensi ke Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa untuk pemenuhan HKSR.
d. Tetap melakukan pertemuan rutin.
e. Promosikan semua kegiatan melalui medsos dan pertanggungjawaban kepada public

FKPAR Lampung

a. Pengorganisasian melalui pendidikan kritis dan penguatan ekonomi perempuan (CU dan pengembangan kewirausahaan) untuk penguatan kepemimpinan perempuan dan perempuan muda.
b. Dan akan terus membangun komunikasi dan koordinasi FKPAR ditiap tingkatan
c. FKPAR melakukan Advokasi bersama kepada Pemerintah dr Desa sd Prop untuk alokasi Anggaran program HKSR.
d. Akan terlibat aktif dalam forum OSSL, forum tokoh agama, pemerintahan desa hingga kabupaten untuk mendorog kebijakan dan anggaran untuk pemenuhan hak kesehatan perempuan.
e. Memperkuat aksi kolektif jaringan organisasi perempuan.

SEMINAR VIRTUAL
PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK
KONSORSIUM PERMAMPU



SEMINAR VIRTUAL PERTANGGUNG JAWABAN PUBLIK KONSORSIUM PERMAMPU

"Suara Perempuan Akar Rumput & Pendukung untuk Komitmen dan Keberlanjutan Advokasi HKSR Perempuan di Sumatera"

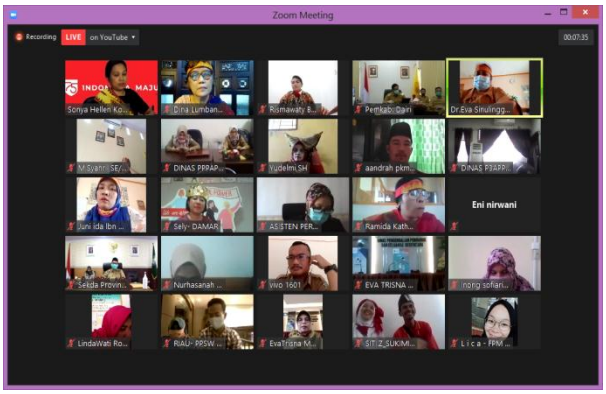


Pada tanggal 31 Agustus 2020 jam 13.00- 17.30 WIB, PERMAMPU menyelenggarakan Seminar Virtual menggunakan platform Zoom dan Facebook sebagai pertanggung-jawaban public kepada segenap pihak yang terlibat dalam Program Advokasi HKSR.

Acara ini mempunyai 2 tujuan, yaitu:

- Memperkenalkan pendekatan PERMAMPU dan cerita keberhasilan serta tantangan program dari perspektif perempuan akar rumput bersama para pihak yang selama ini mendukung Advokasi HKSR.
- Pertanggung-jawaban PERMAMPU terhadap publik, dan mendorong dukungan Pemerintah serta seluruh pihak terkait untuk keberlanjutan Advokasi HKSR, khususnya di pulau Sumatera.

Seminar yang dihadiri oleh 100 peserta di Zoom dan 140 di Youtube menjadi arena untuk mengucapan terima kasih kepada semua pihak yang selama 5 tahun lebih telah mendukung Konsorsium PERMAMPU dalam melaksanakan Program, serta menguatkan kepercayaan diri dan komitmen para kader serta para pihak termasuk Konsorsium PERMAMPU bahwa peran strategis dan komitmen mereka untuk Program Advokasi HKSR di 8 provinsi Sumatera akan menjadi fondasi utama keberlanjutan program ini ke depan.



Dalam seminar ini pembicara kunci mewakili Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah Ibu Ir. Agustina Erni, M.Sc, Deputi Bidang Kesetaraan Gender dengan isi ringkas sbb.:

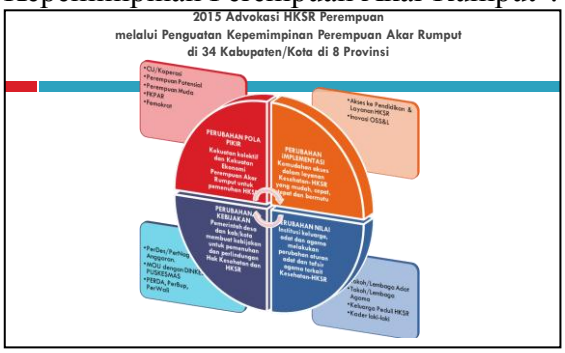
"Menteri KPPPA mengapresiasi PERMAMPU yang memperjuangkan issu HKSR, kemudian Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten di Sumatera) yang telah bekerjasama dengan banyak CSO yang telah bekerja di lapangan dalam issu HKSR serta MAMPU yang telah mendukung PERMAMPU. Pemerintah berkomitmen mendorong issu kesehatan seksual dan reproduksi sebagaimana yang dijamin dalam ICPD dan Konferensi Dunia Perempuan yang ke 4 dan target SDGs 2020 khususnya menurunkan angka kematian ibu. Pemerintah menyadari masih bayak tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan HKSR. Sebetulnya pemerintah telah banyak melaksanakan program kesehaan SR untuk mencapai target SDGs melalui program KB serta adanya dukungan masyarakat akar rumput lewat berbagai CSO yang sangat strategis dan potensial. Menurut kami masalah utama HKSR adalah kemudahan akses baik informasi maupun layanan seksual, reproduksi, kesehatan bagi perempuan dan laki-laki terhadap layanan KB yang aman dan terjangkau, informasi tentang penyakit repoduksi dan persiapan bagi pasangan yang akan menikah. Di tingkat implementasi ada berbagai program yang dilakukan misalnya GENRE. Dalam tataran implementasi pelayanan HKSR sangat dipengaruhi oleh masalah budaya, sikap masyarakat dan ketersedian informasi dan sarana pelayanan serta kesadaran masyarakat dalam mengaskses layanan. PERMAMPU bersama perempuan akar rumput telah membantu pemerintah

dengan berbagai best practise dalam meningkatkan pelayanan HKSR di daerah. Diharapkan melalui gerakan ini kita dapat mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) yang relatif menurun dari 4.999 (2012); 4912 (2016) dan 1.712 (2017) serta bersama-sama untuk menekan angka perkawinan anak. Dalam menyelesaikan masalah HKSR serta issu perempuan kami mendorong kerjasama lintas sektor dengan pedekatan pentahelix yang didalamnya ada peran pemerintah, komunitas, media massa, perguruan tinggi dan dunia usaha. Saat ini KPPPA bekerjasama dengan Kementerian Desa sedang mengupayakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan desa. Kami berharap MAMPU dapat mengangkat best practise Permampu dalam tulisan/ dibukukan".

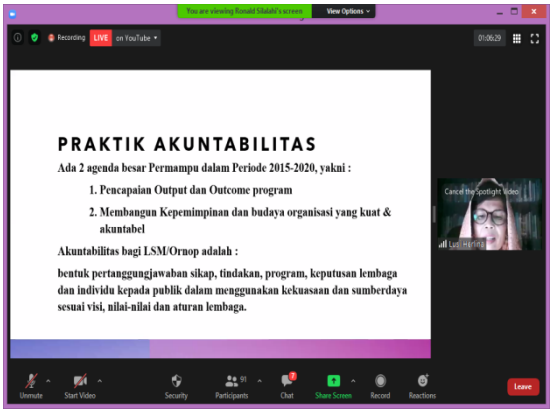


Sementara moderator adalah Sonya Helen Sinombor, Jurnalis Senior Kompas yang membawakan acara dengan penuh semangat, kemudian mempersilahkan 3 pembicara mewakili PERMAMPU menyampaikan ringkasan **Advokasi HKSR & Inovasi PERMAMPU, yaitu:**

a. **Dina Lumbantobing**
(Koordinator PERMAMPU)
dengan judul "Membangun Program & Manajemen Konsorsium untuk Penguatan Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput".



b. **Lucy Herlina**
(Pengawas PERMAMPU)
"Menjaga Praktik Akuntabilitas untuk Kepemimpinan PERMAMPU" dengan isi pokok sbb.:



c. **Elpina Sipayung**
(Grant Manager PERMAMPU)
"Transparansi PERMAMPU melalui Pertanggung Jawaban Publik PESADA Tahunan & Newsletter", yang isi intinya adalah bahwa program Advokasi HSR Permampu memperoleh dukungan dana dari MAMPU sebesar $ 3.742.980.

Keterangan	Budget	Realisasi	Sisa/ Hutang Program	%
Program	31.552.034.924	30.352.502.106	1.199.532.818	96,20
Management Overhead	5.363.795.684	5.387.030.456	176.765.748	96,82
Jumlah	37.115.830.608	35.739.532.542	1.376.298.066	96,29

Di bagian kedua, seluruh pemanfaat dan para pihak yang terlibat menyampaikan testimony mengenai proses dan capaian Program Advokasi HKSR. Dalam newsletter ini disampaikan berdasarkan EOPO sebagai berikut:

EOPO 1: Perempuan akar rumput (pedesaan, miskin kota, muda 12-20 tahun) mempunyai kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi untuk pemenuhan HKSR.

a. **Penguatan ekonomi perempuan** menjadi pintu masuk untuk mendukung gerakan perempuan dan kemandirian perempuan.

Hingga Agustus 2020, CU/Koperasi dampingan Permampu telah mengembangkan 589 kelompok dengan 23.610 anggota dan saham sebesar Rp 64.689.985.976,-. Pinjaman yang beredar sebesar Rp. Rp 62,291,018,882 dan pada tahun buku 2019 memperoleh SHU Rp. 6.720.115.655,-. Tiga perwakilan CU menyampaikan testimony sbb.:

- **Lindawati – Ketua Koperasi Wanita Bunga Bangsa Kab. Rokan Hilir – Riau:** Koperasi WBB memiliki anggota 636 orang 5.2 milyar, dan pinjaman sekitar 6 milyar. Koperasi telah membantu ekonomi perempuan dan keluarga. Di dalam kegiatan koperasi, anggota mendapatkan pendidikan kritis dan penguatan perempuan khususnya issu HKSR.
- **Rita Saparlasia – CU Muaraenim Kab. Muaraenim – SUMSEL:** CU/Koperasi memotivasi kami untuk menabung, memanfaatkan pinjaman untuk usaha produktif dan memperoleh SHU. Pengetahuan tentang penguatan ekonomi di CU saya bagikan ke kelompok peremuan dasawisma dan perwiritan pengajian dengan membentuk simpan pinjam. DI kelompok kami memperoleh pendidikan kritis dan terlibat dalam aksi kolektif perempuan. FKPAR juga aktif mendorong anggotanya untuk memeriksakan kesehatan resproduksi (IVA Test) melalui OSS&L di Puskesmas Gelumbang, Kab. Muaraenim.
- **Sondang Boangmanalu – Ketua DP CUPP SUMUT:** CU menumbuhkan kekuatan ekonomi keluarga, asset atas nama perempuan, memperoleh pendidikan kritis dan meningkat kesehatan reproduksi perempuan.

b. **Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR)** adalah organisasi perempuan yang menyatukan seluruh kelompok dampingan Permampu (CU, FPM, kader). FKPAR didirikan pada tahun 2015 di Padang, Sumatera Barat. Jumlah anggota FKPAR 25.234 orang perempuan yang tersebar di 8 provinsi di Sumatera. Tiga perwakilan FKPAR menyampaikan testimony sbb.:

- **Sri Suharni – FAKTA DAMAR, Kab.Tanggamus – Lampung: P**endidikan kritis yang kami dapat dari DAMAR menumbuhkan kesadaran untuk membentuk organisasi Gerakan Perempuan Lampung. Tahun 2015 Gerakan Perempuan Lampung bergabung ke dalam FKPAR Sumatera dengan memperjuangkan issu pemenuhan HKSR. Ke depan FKPAR Lampung akan terus berjuang untuk pemenuhan HKSR perempuan karena memiliki anggota, perempuan potensial dan keterampilan advokasi, dan memiliki jaringan.
- **Dinta Solin membacakan testimony Juli Kariani – Anggota FKPAR SUMUT:** Aksi kolektif FKPAR Sumatera mengkampanyekan stop kekerasan terhadap anak, mengkritisi RUU Ketahanan Keluarga dan menggalang dukungan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Juliani Kariyani mewakili FKPAR Sumatera menjadi narasumber dalam Konferensi HKSR di Vietnam menyuarakan kondisi yang dialami perempuan Nias dalam aturan adat yang diskriminatif. Ke depan FKPAR harus terus bergerak melakukan pendidikan kritis bagi perempuan
- **Yudelmi – Ketua FKPAR Provinsi SUMBAR:** FKPAR Sumbar menjadi motor penggerak bagi ormas perempuan, memiliki kader yg duduk di posisi publik dan berpartisipasi dalam Musrembang Desa sehingga kelompok kami dapat mengakses alokasi APBDesa untuk pemenuhan HKSR, anggaran operasional Sekolah Perempuan, dan mengakses anggaran POKIR DPRD. Basamo Kita.

c. **Forum Perempuan Muda** terdiri 1.528 orang perempuan muda dan laki-laki muda pendukung aktif mengikuti diskusi kritis tentang HKSR, kampanye stop perkawinan anak dan memulai wirausaha untuk kemandirian.

- **Hana Septi Kusumaningrum – FPM tk. Provinsi Jambi:** Pendidikan kritis yang saya peroleh dari APM membuat saya dari tidak menjadi tau tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Saya juga mendapat dukungan berwirausaha berjualan online skin care dan saat ini sudah tembus omset penjualan lima juta dalam sebulan. Saya meyakini jika perempuan muda sudah berwirausaha akan mengurangi terjadi perkawinan anak.
- **Risma Risa – FPM Kab. Tanah Datar, SUMBAR:** Saya senang mendapat edukasi tentang HKSR karena meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehtatan seksual dan reproduksi bagi remaja. Saya mendapat dukungan dari LP2M untuk berwirausaha berjualan tali kur selama setahun terakhir. Saya berharap perempuan muda di Sumatera mulai berwirausaha sejak tamat SMA sehingga akan terhindar dari perkawinan anak.
- **Nurfadila - FPM Kab. Langkat – SUMUT:** FPM Langkat dampingan Pesada mulai berinisiatif berwirausaha dengan menjahit. Kami telah memproduksi masker untuk dijual dan disumbangkan bagi pencegahan covid-19. Kami meyakini bahwa kegiatan wirausaha dan penguatan ekonomi bagi perempuan muda dapat mencegah tingginya angka perkawinan anak.
- **Lica Veronica– Koordinator FPM Tk. Prov. Bengkulu:** Dalam advokasi HKSR dan Pencegahan perkawinan anak, kami menggunaan media sosial, mengikuti diskusi kritis dan aksi kolektif baik dari tingkat desa, kabupaten hingga pernah bertemu di provinsi tingkat Sumatera. Tantangan yang kami hadapi hadapi ketika melakukan dengar pendapat adalah masih ada pandangan aparatur bahwa bicara HKSR masih tabu dan cara pandang anak muda dengan orang dewasa sering tidak matching. FPM berperan dalam kampanye pencegahan perkawinan anak melalui media kreatif agar dapat terjadi perubahan sosial dan terpenuhinya HKSR Perempuan Muda.

d. Perempuan Potensial Menuju Dunia Politik & Kepemimpinan Publik"

- **Rismawati Bancin - Anggota DPRD Pakpak Bharat – SUMUT:** Saya adalah perempuan potensial dampingan Pesada yang berhasil menjadi anggota DPRD Kab. Pakpak Bharat. Sebelumnya saya pernah mencalonkan pada pemilu 2009 namun gagal kemudian Pemilu 2019 saya maju dan mendapat dukungan dari keluarga dan CU/SPUK Pesada (pinjaman khusus perempuan di politik, tim pemenangan, dan dukungan suara anggota CU). Dalam posisi saya di DPRD akan konsisten memperjuangan hak-hak perempuan dalam pembangunan. Tantangan yang dhadapi adalah pemilih perempuan masih belum memilih perempuan dan politik uang.
- **Mardiani – Anggota Kelompok CU Harapan Perempuan Desa:** Saya pengurus FKPAR Bengkulu dan pernah ikut Pemilu 2019 namun gagal. Pendidikan kritis yang diberikan oleh CP WCC menjadi perempuan semakin aktif menyuarakan hak-hak perempuan khususnya HKSR.
- **Sriamin – Anggota DPRD Kab.Merangin:** Saya berterimakasih atas dukungan anggota FKPAR Merangin dan APM Jambi berupa pendidikan politik, dukugan suara anggota dan aktif mengawal suara dalam penghitungan. Saya merasa beruntung mendapat pendidikan kritis dari APM Jambi sehingga dari perempuan ibu rumah tangga dapat menjadi wakil perempuan Kab. Merangin di legislatif**.**

EOPO 2 : Perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam layanan HKSR yang mudah, cepat, tepat dan bermutu – PUSKESMAS/Rumah Sakit.

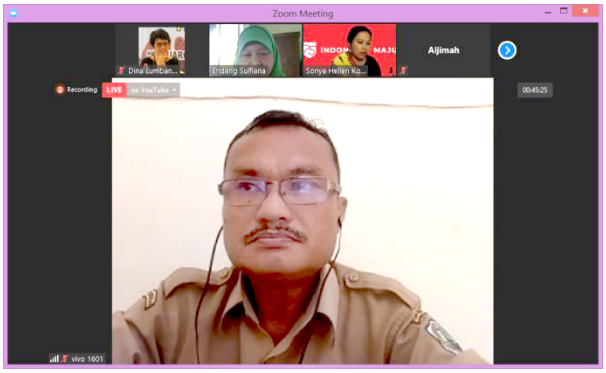
a. PERMAMPU melayani perempuan secara komprehensif untuk memperoleh layanan melalui ***One Stop Service & Learning*** **atau Pusat Pelayanan HKSR Perempuan** di 31 Puskesmas di Pulau Sumatera. Berikut testimony dari 3 PUSKESMAS:

- **Ns. Aandrah, S.Kep. Ka. UPT Puskesmas Sumber Urip, Kabupaten Rejang Lebong – Bengkulu:** Saya mulai terlibat sejak Maret 2019 dalam menjalankan MoU Puskesmas dengan CP WCC Bengkulu tentang OSS&L Pemenuhan HKSR. Sebenarnya program HKSR adalah program yang sudah sejak lama kami lakukan namun terdapat beberapa kegiatan puskesmas seperti program remaja, layanan kesehatan perempuan korban kekerasan di Puskesmas tidak berjalan. Dengan adanya kerjasama ini, Puskesmas didorong untuk aktif memberikan pendampingan dan konsultasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan melalui model OSS&L. Puskesmas terbantu dengan pendekatan anggota CP WCC lebih efektif menjangkau anak-anak muda dan perempuan di wilayah kerja kami. Oleh karena itu kami harapkan agar CP WCC dan Permampu dapat mereplikasi OSS&L ke Puskesmas lainnya di Bengkulu.
- **dr. Eva Sinulingga - Ka. Puskesmas Batang Beruh, Kab. Dairi – SUMUT:** Di Kab. Dairi terdapat 3 Puskesmas yang diajakan bekerjasama dengan Pesada-Permampu dalam pelaksanaan OSS&L. Melalui kerjasama ini, Puskesmas Batang Beruh semakin terbantu memberikan pelayanan pemeriksaan IVA Test, sosialisasi tentang deteksi dini kanker serviks, sosialisasi inisiasi ibu menyusui, pelayanan persalinan di FKTP, dan lain-lain. Pelayanan OSS&L di Puskesmas dilakukan setiap hari, salah satunya menerima masukan dari pengunjung tentang masalah dan kepuasan layanan. Data yang diperoleh menjadi masukan dalam Rapat Mini Lokakarya Puskesmas untuk mereview dan memperbaiki pelayanan kesehatan. Ke depan dihar.
- **Yuliati, S.ST., M.Kes – Puskesmas Gisting, Kabupaten Tanggamus – Lampung:** Kerjasama implementasi OSS&L Puskesmas Gisting dengan Damar Lampung-Permampu telah berhasil mendorong Puskesmas menyediakan layanan konseling HKSR, layanan rujukan bagi korban kekerasan, bekerjasama untuk test HB bagi perempuan, dan juga dengan KUA Gisting untuk persiapan pernikahan. Diharapkan Damar lampung terus melakukan pendampingan OSS&L agar pelayanan HKSR di Puskesmas semakin baik.

EOPO 3 : Institusi keluarga, adat dan agama melakukan perubahan aturan adat dan tafsir agama terkait HKSR.

a. Berjuang bersama Tokoh Adat, Tokoh Agama untuk perubahan aturan adat dan agama agar responsif dalam pemenuhan HKSR.

- **Eliakim Telaumbanua - Ketua Lembaga Budaya Nias – SUMUT:** Saya mewakili tokoh adat (LBN Nias) yang tergabung dalam FMS menyuarakan pentingnya penyederhanaan tahapan pernikahan adat Nias yang dari 9 tahapan cukup dilakukan dalam 3 hari pertemuan agar tingginya biaya dan habisnya waktu untuk pesta dapat dikurangi. Kami ikut dalam melakukan sosialisasi kepada tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam bebagai kegiatan seminar dan diskusi yang difasiitasi oleh Pesada. Upaya ini diharapkan dapat mengeliminir kekerasan dan pemiskinan yang dialami oleh perempuan di dalam perkawinan.



- **Afrizal, S.Ag., M.Hi – Kepala KUA Gisting – Lampung:** Pendampingan yang dilakukan oleh Damar Lampung tentang pemenuhan HKSR mendorong saya untuk merespon tingginya kasus

KDRT di Kecamatan Gisting. Kami menerapkan konseling bagi setiap pasangan calon pengantin dan membuat pernyataan tidak melakukan KDRT. Melalui upaya ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus KDRT di masa depan sehingga dapat mewujdukan keluarga yang sakinah. Saya berharap Permampu terus melakukan pendampingan kepada KUA di Lampung.

- **Pdt. Mangara Sinamo, M.Th - Sekjen GKPPD SUMUT:** GKPPD dan Pesada telah menerbitkan Buku Konseling Pernikahan berisi tentang pemahaman KDRT, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Buku pegangan ini menjadi panduan bagi pendeta di lingkungan GKPPD dalam melakukan konseling pernikahan.

b. Keluarga Peduli HKSR diawali dengan melakukan penyadaran kepada suami peduli HKSR dan didukung laki-laki muda. Dari rangkaian penyadaran tersebut, Permampu menerbitkan Buku Pegangan Pendidikan Kesehatan Tubuh dan Reproduksi Untuk Anak yang digunakan oleh keluarga dampingan Permampu. Permampu juga telah melakukan Pemilihan Keluarga Peduli HKSR sebagai role model bagi masyarakat. Beberapa kriterianya antara lain anggota keluarga tidak merokok, suami tidak pelaku kekerasan, mendukung perempuan, suami bersedia menggunakan kontrasepsi, dan lain-lain.



- **Siti Zulaikah & Sukimin, Champions Keluarga HKSR tingkat Provinsi Jambi:** Dari penyuluhan dan buku pegagan pendidikan tubuh kami merasa dari yang tidak tau menjadi tau tentang kesehatan tubuh dan kesehatan reproduksi, memahami mendidik anak anak kami dan dapat berbagi pengalaman dengan keluarga lainnya. Kami berharap keluarga lainnya dan para suami dapat memanfaatkan buku pegangan.
- **Eni Jualianti & Sabarudin, Champions Keluarga HKSR tingkat Provinsi Riau:** Sebelumnya saya tidak tau issu HKSR dan sekarang semakin memahami. Kini saya semakin peka, ikut membantu melakukan kerja domestik, memberi hak menentukan jumlah anak kepada isteri dan pergi mengakses layanan pemeriksaan reproduksi**.**

EOPO 4: Pemerintah desa dan kabupaten/kota membuat kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan HKSR.

a. Permampu bersama Forum Multistakeholder telah mengadvokasi sebanyak **159 regulasi** untuk mendorong pemenuhan HKSR antara lain: 51 MoU, 22 Peraturan Bupati, 21 Peraturan Daerah, 25 Peraturan Desa/Nagari, 8 Pergub, 7 Rencana Aksi Daerah, 6 Surat Edaran Bupati, 5 Peraturan Walikota, dan 14 peraturan lainnya.

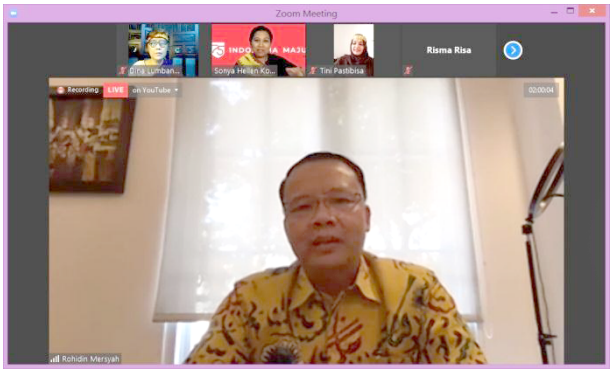
b. Terbangunnya kontak Femokrat untuk membangun sinerji Perempuan untuk Advokasi Kebijakan HKSR:

- **Meliatian Sukaisih, SKM – Kabid. Perlindungan Anak DP3APPKB Kab. Seluma – Bengkulu:** Saya terlibat dalam Forum Femokrat ketika masih bertugas di Dinas Kesehatan di Kab. Seluma. Saat itu CP WCC mengajak kami untuk mendiskusikan tingginya perkawinan anak di Kab. Seluma. Tahun 2017 kami mengajukan draft pencegahan perkawinan anak dan akhirnya tahun 2018 disahkan menjadi Perbup. Untuk mendukung pencegahan perkawinan anak, posisi saya Dinas P3APPKB turut mensosialisasikan

pencegahan perkawinan anak melalui Forum Anak. Saya merasa meskipun berpindah institusi, saya tetap dilibatkan dalam Femokrat untuk turut menyuarakan issu HKSR.

- **Wahyudiwiayati, SKM;** berhasil mendorong kebijakan anggaran untuk penanganan stunting dan pemenuhan HKSR.
- **Inong Sofiarini, SSTP.,S.Sos – Kabid. Kebudayaan BAPPEDA Kab. Aceh Utara:** Melalui Femokrat, kami perempuan di birokrat memiliki forum sharing untuk menguatkan antara perempuan di eksekutif dan legislatif. Salah satu keberhasilan kami adalah mengadvokasi Qanun KIBBLA (hak inisiatif DPRK Aceh Utara), meningkatnya alokasi anggaran yang responsif gender, dan terlibat mengarusutamakan issu HKSR dalam pencapaian target SDGs. Kami berharap pendampingan Femokrat terus dilanjutkan oleh Flower Aceh-Permampu.

Respon Pemerintah terhadap Program Advokasi HKSR Perempuan



- **H. Rohidin Mersyah, M.M.A (Gubernur Bengkulu)**
  Saya mengapresiasi pertemuan virtual yang diselenggarakan Permampu yang tidak kurang makna subtantifnya meski tidak bertema langsung. Saya berterima kasih kepada CP WCC dan Permampu untuk pemberdayaan perempuan dan advokasi pemenuhan HKSR Perempuan. Di Bengkulu, partisipasi dan keterwakilan perempuan di ranah publik sudah semakin baik, di legislatif DPR 3 orang, 2 orang DPD, 9 perempuan di DPRD Provinsi, 10 orang perempuan di eselon 2. Dari data tersebut, seyogyanya kebijakan publik harus responsif terhadap issu perempuan. Tantangan kami adalah masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Bengkulu. Kita telah membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak yang melibatkan komunitas di tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Dunia kekinian dan perubahan lingkungan yang terjadi seolah-olah selalu berdampak terhadap perempuan dan anak, oleh karena itu saya berharap CP WCC dan Permampu dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan.



- **DR. Eddy Keleng Ate Berutu (Bupati Kab. Dairi-SUMUT)**
  Kami melihat advokasi HKSR oleh Pesada-Permampu telah berkontribusi meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan akses perempuan akar rumput terhadap layanan kesehatan tubuh dan reproduksi. Dalam budaya patriakhal, kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi dan kita cenderung menyalahkan korbannya-perempuan. Oleh karena itu penting sekali pendidikan HKSR, perlindungan bagi perempuan & anak dan pendampingan terus menerus. Terkait inisiatif GKPPD dalam menggunakan Buku Pengangan untuk Konseling Pernikahan, kita akan dorong dapat juga dilakukan di lembaga keagamaan lainnya.



- **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3PAKB) Kabupaten Seluma**
  Bupati Kab. Seluma sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap dapat berlanjut ke depannya. Di Kab. Seluma telah ditetapkan Peraturan Bupati No 27 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Kami berharap dengan adanya Peraturan Bupati tersebut tidak ada lagi terjadinya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Seluma.

- **Eva Trisna Murni, SKM dan dr. Aspinuddin (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman)**
  Kami berterimakasih atas kegiatan Permampu yang difasilitasi oleh LP2M yang telah memberikan masukan-masukan kepada kami untuk dalam meningkatkan program mengurangi angka kematian ibu dan bayi di Padang Pariaman. Kami berharap kegiatan Permampu ke depan dapat menjangkau 17 kecamatan keseluruhan yang ada di Padang Pariaman. Sebagai upaya keberlanjutan program HKSR ke depan kami akan melanjutkan penyuluhan keseharan reproduksi kepada remaja (Duta Genre), penyuluhan kesehatan reproduksi sehat dan perencanaan anak kepada calon pengantin bekerjasama dengan Kementerian Agama Kab. Padang Pariaman, aplikasi Kopi Darat untuk konsutasi Kesehatan reproduksi dan pelatihan usaha bagi perempuan melalui program UPPKS.

- **Nurhasanah Kabid Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Merangin**
  Kami berterimakasih kepada Permampu melalui APM Jambi yang telah membantu keterbatasan Dinas dalam mensosialisasikan pemenuhan HKSR bagi perempuan, remaja dan masyarakat desa dan juga terlibat dalam pendampingan perempuan korban kekerasan di Kab. Merangin. Kami berharap kerjasama Dinas dan APM dapat terus berkembang menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjangkau penyuluhan HKSR.

Cerita Sukses dan Pembelajaran PERMAMPU



Cerita Sukses dan Pembelajaran PERMAMPU

CERITA SUKSES

- **Manajemen Konsorsium PERMAMPU setara dan partisipatip**.

  Tidaklah mudah memulai 8 LSM Perempuan yang sejak awal langsung sepakat untuk membentuk model manajemen dengan mempercayakan pengelolaannya kepada Host (PESADA), dan menyusun Pedoman Perilaku. Fiduciary Keuangan yang digunakan MAMPU yang sangat cermat dan partisipatip sangat dihargai seluruh anggota, demikian juga instrument IDF (Institutional Development Framework) yang biasa digunakan PESADA dan beberapa anggota di jaringan lainya. Kedua alat ini kemudian digabung dan dimodifikasi dengan dukungan MAMPU menjadi PrimeL (Participatory Integrated Monitoring Evaluation & Learning), dan rutin dilaksanakan setiap tahun di semua anggota PERMAMPU. Transparansi dan Akuntabilitas PERMAMPU dijaga ketat melalui alat ini, dan setiap semester semua kegiatan utama dan keuangan PERMAMPU dipublikasikan dalam Newsletter, yang sampai saat ini telah mencapai 11 edisi.

  Demikian juga halnya dengan Pendidikan Pedoman Perilaku, yang secara teratur dididik Pengawas. Salah satu nilai yang secara khusus didorong adalah soal kepemimpinan perempuan di lembaga, khususnya pengkaderan dan suksesi. Bahkan PERMAMPU menulis pengalaman kepemimpinan perempuan di LSM Perempuan Sumatera dan tantangannya secara transparan dalam buku ““Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera’.

  Keseluruhan hal di atas kemungkinan besar menjadi indicator yang membuat nama Konsorsium PERMAMPU masuk di “2018 Civil Society Organization Sustainability Index For Asia”, 5th Edition – November 2019, yang di halaman 36 menyebut: "Most strong CSOs are based in Java, although some CSOs in other regions—including the Eastern Indonesia Knowledge Exchange Foundation (BaKTI) in Makassar, South Sulawesi, and the Women of Sumatera Mampu (PERMAMPU), a consortium of eight women’s organizations in Sumatra—have strong organizational capacities."



Para pemimpin Konsorsium PERMAMPU: Pengurus, Pengawas, Direktur 8 lembaga, Koordinator dan Host PERMAMPU

- **Kolaborasi untuk Advokasi Kebijakan.**

  Pengalaman kerja kolektif advokasi kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (HKSR) Perempuan di Bengkulu yaitu Pencegahan Perkawinan Anak oleh Cahaya Perempuan WCC. Sebagai anggota PERMAMPU, ini adalah tindak lanjut dari rekomendasi hasil penelitian KTD dan Persoalan Gizi

Perempuan dan Perempuan Muda yang terjadi di wilayah Kabupaten Seluma dan Rejang Lebong. Upaya mendorong lahirnya kebijakan tersebut diawali di Kab. Seluma dimana angka kawin anak termasuk tinggi di provinsi Bengkulu pada pertengahan tahun 2016. Dengan kerjasama bersama FMS dampingan CP WCC dan mitra MAMPU lainnya di Bengkulu, telah keluar PerBup Kabupaten Seluma, dan dilanjutkan dengan PerGub Propinsi Bengkulu. Pada tanggal 12 November 2018, Bupati Seluma menandatangani Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak di Kab. Seluma No. 900 – 483. Tahun 2018 dan Surat Edaran No. 180/142/SE/B2/ DP3APP&KB/2018 tentang Sosialisasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Menyambut baik itu, Pemerintah Desa Talang Tinggi Kec. Seluma Barat Kab. Seluma mengeluarkan Surat Edaran Kepala Desa Talang Tinggi No.01/05/SE/XI/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Desa Talang Tinggi pada tanggal 21 November 2018.

Sementara itu pada Juli 2018, Gubernur Bengkulu menandatangani Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Propinsi Bengkulu.

Kemudian Bupati Seluma menandatangani Surat Edaran Bupati agar kepala Desa dan Lurah mengeluarkan Peraturan Pencegahan Perkawinan Usia Anak No. 140/480/B-2/DP3APPKB/2019 pada tanggal 26 November 2019.



Dukungan Multi Stakeholder (FMS) dalam Advokasi Kebijakan HKSR di Bengkulu

- **Keberhasilan WCC dalam pengorganisasian untuk penguatan ekonomi perempuan.**

  CP WCC di Bengkulu dan WCC Palembang yang sebelum bergabung dalam Konsorsium PERMAMPU belum pernah melakukan pendampingan kelompok perempuan dan mengadakan kegiatan untuk penguatan ekonomi, berhasil mengorganisir perempuan menjadi CU. Cukup banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari kecurigaan mengenai CU sebagai kelompok yang mungkin kurang dapat dipercayai untuk mengurus uang, kemampuan kelompok dan staff lapang dalam mengelola keuangan, hingga ke tuduhan bahwa bunga pinjaman adalah riba. Upaya khusus berupa magang ke PESADA, pendidikan staff lapang dan asistensi, serta monitoring yang teratur sangat membantu kedua lembaga tersebut berhasil mendampingi 22 kelompok CU dengan 515 anggota dan saham sebesar Rp. 536.690.319,-.



Diskusi lapang tantangan mengelola CU di Sumatera Selatan.



Training di Bengkulu, bagian dari kegiatan pengembangan CU.

Pembelajaran PERMAMPU

- **Penguatan ekonomi perempuan muda.** Setelah program ini hampir berakhir, PERMAMPU melihat bahwa penguatan ekonomi melalui kewirausahaan perempuan muda seyogyanya dapat dilaksanakan lebih cepat. Selama kurang lebih 5 tahun, perempuan dan laki-laki muda dampingan PERMAMPU lebih merupakan kelompok untuk pendidikan kritis HKSR dan menjadi salah satu unsur kekuatan kolektif untuk advokasi layanan dan pendidikan HKSR; baik melalui FKPAR maupun melalui jaringan perempuan muda di Sumatera dan Nasional. Penundaan dilakukan karena melihat perkembangan penguatan ekonomi melalui CU/Koperasi yang masih tersendat di beberapa lembaga yang memang sama sekali belum pernah melakukan pengorganisasian perempuan dari aspek ekonomi ataupun yang menghadapi berbagai tantangan di lapang sebagaimana disebut sebelumnya (budaya arisan dan 'riba'). Keragaman dan tingkat kemampuan 8 lembaga membutuhkan waktu untuk dapat secara bersama memulai sesuatu yang baru dalam waktu yang relative pendek. Hanya karena pandemic Covid-19, ide membangun kewairausahaan perempuan dapat disepakati sebagai sebuah pendekatan baru yang sesuai untuk pencegahan perkawinan usia anak dan dini.



Perempuan muda dan laki-laki pendukung dalam Konperensi Internasional 2019

- **Perempuan Tokoh Adat dan Agama** Menjaring dan mendidik perempuan agar menjadi tokoh adat dan agama, kurang dipikirkan sejak awal. PERMAMPU lebih menjaring tokoh adat yang sudah ada dan kuat untuk dilobby dalam rangka advokasi, sehingga kurang memperhatikan pentingya mendidik perempuan-perempuan kader yang mempunyai modal ataupun potensi menjadi tokoh-tokoh baru di masyarakat adat. Posisi perempuan di masyarakat adat sebenarnya masih memungkinkan untuk

dikembangkan. Misalnya melalui jalur pendidikan sebagai juru bicara di adat (Batak: 'parsinabul'). Demikian juga halnya dalam lembaga keagamaan, yang sebenarnya bisa dikembangkan; terutama karena anggota PERMAMPU sebenarnya terlibat dalam pengembangan KUPI (Ulama Perempuan). Pendidikan ini harus dibarengi dengan perubahan komunitas terutama para laki-laki untuk dapat menerima perempuan sebagai bagian dari para tokoh adat maupun agama, dan membutuhkan waktu.



Diskusi Adat dan perempuan di Humbang Hasundutan SUMUT.

- **Pengembangan Femokrat.**
  Secara terencana seharusnya melakukan strategi Pengembangan Femokrat melalui pejabat perempuan yang merupakan pimpinan wilayah (Bupati/Wakil, Gubernur/Wakil). Seperti Lampung yang beruntung mempunyai perempuan yang menjabat sebagai Wakil Gubernur. Minimal melalui pejabat laki-laki yang peka gender dan mengerti pentingnya penguatan kepemimpinan perempuan di birokrat; meski hal ini harus dilakukan secara hati-hati. Pengalaman di sebuah Kabupaten di SUMUT telah menunjukkan bahwa pendekatan kepada pimpinan laki-laki telah membuat perempuan birokrat hanya patuh atau terpusat kepada pimpinan laki-laki yang peka gender tersebut, dan kurang menumbuhkan kemandirian birokrat perempuan untuk mengembangkan forum mereka sendiri.



Ibu Chusnunia Halim,
Wakil Gubernur Lampung,
pendukung utama Femokrat di Lampung,



Diskusi Tokoh Adat & Agama
di Aceh Utara

Webinar Pengakhiran MAMPU







VISI KONSORSIUM PERMAMPU

Perempuan mengalami dan menikmati pemenuhan
perlindungan dan penghormatan
Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (KHSR) yang lebih baik.

TUJUAN 1

Perempuan akar rumput (pedesaan, miskin kota, muda/usia 12-20 tahun
mempunyai kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi
untuk pemenuhan HKSR).

TUJUAN 2

Perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam
pelayanan HKSR yang mudah, cepat dan tepat dan bermutu.

TUJUAN 3

Institusi keluarga, adat dan agama melakukan perubahan
aturan adat dan tafsir agama
terkair HKSR (FMS).

TUJUAN 4

Pemerintah Desa dan Kab/Kota membuat kebijakan untuk
pemenuhan dan perlindungan HKSR.

WILAYAH CAKUPAN PROGRAM PERMAMPU



SEKRETARIAT PERMAMPU
Jl. Pancur Siwah No 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org Facebook: PermampuConsurtium